

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Januari 2025, Kabupaten Dharmasraya mencatat inflasi tahunan (y-on-y) sebesar 1,18 %, menurut data dari BPS, menempatkannya di antara daerah dengan inflasi moderat di Sumatera Barat. Pada Maret 2025, Kabupaten Dharmasraya mencatat inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,99 %, inflasi y-to-d (year-to-date) sebesar 0,84 %, dan inflasi y-on-y sebesar 0,39 %.

Inflasi sebesar 0,99 % (mtm) pada Maret di Dharmasraya menandakan adanya kenaikan harga barang atau jasa secara umum selepas beberapa tekanan lanjutan dari Februari. Keseluruhan, Januari hingga Maret 2025 menampilkan tren inflasi di Dharmasraya yang cenderung menurun dari 1,18 % (Januari) ke 0,39 % (Maret) secara tahunan.

Penurunan harga beras premium dan medium memberi indikasi bahwa sebagian harga pangan pokok berhasil terjaga stabil atau turun. Secara ringkas, Triwulan I 2025 menampilkan inflasi di Dharmasraya yang relatif terkendali dengan penurunan laju dari Januari ke Maret, sedangkan harga pangan menunjukkan variasi: beras cenderung turun, beberapa komoditas seperti cabai merah dan telur sempat mencatat kenaikan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Kendala utama, meskipun kebijakan diskon listrik menahan inflasi, kenaikan harga komoditas volatile seperti cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras tetap memberikan tekanan inflasi—menyulitkan stabilisasi harga meskipun komponen terstruktur (DP) menurun.
- Kendala pengendalian inflasi di bulan Maret meliputi:  
Kurangnya antisipasi terhadap efek normalisasi tarif listrik.  
Lonjakan permintaan musiman (Ramadan) menyebabkan tekanan terhadap pasokan dan harga komoditas pangan.  
Koordinasi TPID setempat dalam mengantisipasi kondisi ini tampaknya perlu diperkuat
- Ringkasan Kendala Pengendalian Inflasi
- Kenaikan harga komoditas pangan volatil (cabai, daging ayam, dll) meski ada disinsentif listrik.
- Berakhirnya diskon listrik menyebabkan lonjakan tarif yang belum diantisipasi. -  
Permintaan tinggi karena Ramadhan/Lebaran, memicu kenaikan harga pangan. -  
Koordinasi pengendalian inflasi lokal (TPID) perlu ditingkatkan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### Meningkatkan Permintaan Domestik (Demand Side)

- Mendorong belanja pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBD pada sektor padat karya dan proyek infrastruktur kecil/menengah.
- pendampingan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas UMKM guna menurunkan biaya produksi dan mendorong penjualan.
- Mengadakan event ekonomi lokal (bazaar, pameran, festival daerah) untuk menggerakkan konsumsi masyarakat.

## Menjaga Harga Komoditas Strategis (Supply Side)

- Menyerap kelebihan pasokan hasil pertanian melalui BUMD pangan atau kerja sama dengan Bulog untuk stabilisasi harga petani.
- Diversifikasi saluran distribusi agar produk lokal dapat dipasarkan ke wilayah lain dengan permintaan tinggi.

Pendampingan digital marketing untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

pelaksanaan evaluasi kegiatan pengendalian inflasi daerah berjalan dengan sangat baik. kebijakan pengendalian mendorong pengeluaran pemerintah menjadi sangat penting dan memberi pengaruh yang signifikan terbukti dengan kondisi inflasi di bulan selanjutnya ( April 2025 ) untuk YoY 1,07 % dan MtM

### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian, memasuki pasca Ramadhan idul fitri. pemerintah menjaga pasokan agar tetap stabil, hal ini agar harga bahan pangan tidak terus naik, selain itu koordinasi dan pemantauan harga tetap dilakukan agar deteksi dini atas kenaikan harga dapat dicegah